



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

| | |
|-------------|---|
| Judul | : Mulai tahun depan, beli gas melon pakai NIK |
| Tanggal | : Jumat, 29 Agustus 2025 |
| Surat Kabar | : Rakyat Merdeka |
| Halaman | : 2 |

Mulai Tahun Depan

Beli Gas Melon Pakai NIK

Tahun depan, masyarakat yang akan membeli gas melon atau gas 3 kilogram harus siap-siap membawa KTP. Sebab, Pemerintah melalui Kementerian ESDM akan memberlakukan pembelian gas melon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini Pemerintah sedang mengkaji skema pembelian gas elpiji (LPG) 3 kilogram menggunakan NIK. Menurutnya, kebijakan ini akan mulai diterapkan tahun depan.

"Tahun depannya juga (beli LPG pakai NIK)," kata Bahlil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).

Melalui kebijakan baru ini, Bahlil berharap agar masyarakat yang mampu tidak menggunakan gas melon. Ia bahkan secara terang-terangan meminta agar penduduk yang masuk kategori

mampu atau kaya agar sadar diri. Kebijakan tersebut mendapat persetujuan dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurut dia, membeli gas melon menggunakan NIK cukup baik.

Namun, Puan mengingatkan Pemerintah untuk memastikan kesiapan infrastruktur data dan pelaksanaan teknis di dalamnya. Misalnya, teknologi dan sistem distribusi dengan basis DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) dan kelemparan e-KTP.

"Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa teknologi dan sistem distribusi yang tinggi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), mengalami hambatan dalam mengakses LPG bersubsidi hanya karena masalah administratif," tutur dia di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo sangat mendukung

kebijakan tersebut. Baginya, program membeli gas melon menggunakan NIK meminimalisir potensi kebocoran subsidi. "Sangat baik dan patut untuk diapresiasi," katanya.

Sementara, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLCI), Niti Emiliana mengingatkan jika program gas melon dengan NIK harus dijalani dengan matang.

Program ini juga harus disosialisasikan dengan masif agar masyarakat di daerah-daerah terpencil mengerit dan waspada mengenai pembelian gas melon menggunakan NIK. "Jika program ini tidak tersosialisasi akan berpotensi jadi bumerang dan menimbulkan antrian panjang," kata Niti, mengingatkan.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Sartono Hutomo dan Niti Emiliana terkait dengan program pembelian gas melon menggunakan NIK, berikut wawancaranya.

SARTONO HUTOMO

Anggota Komisi VI DPR

Pemakaian NIK Lebih Efektif & Tepat Sasaran



“

Program tersebut bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran, mengingat selama ini subsidi banyak dinikmati rumah tangga mampu atau bahkan pelaku usaha besar.

NITI EMILIANA

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Sosialisasi Secara Matang, Agar Tidak Jadi Bumerang



“

Kebijakan ini ada potensi mempersulit akses bagi masyarakat yang sekiranya belum terdaftar atau mungkin di luar jangkauan dan belum masuk pendataan secara baik.

Tahun depan Pemerintah akan memberlakukan pembelian gas melon pakai NIK. Bagaimana pendapatnya?

Langkah pemerintah untuk memberlakukan pembelian gas melon dengan NIK merupakan kebijakan pro rakyat yang patut diapresiasi dan diberikan dukungan.

Program tersebut bertujuan agar subsidi lebih tepat sasaran. Mengingat selama ini subsidi banyak dinikmati rumah tangga mampu atau bahkan pelaku usaha besar. Selain itu, integrasi Sosial dan NIK. Pemerintah ini bisa membantunya hanya kelompok miskin dan rentan yang berhak membeli.

Apakah Anda setuju dengan penggunaan NIK untuk membeli gas melon?

Tentu setuju selama program tersebut benar memang menyentuh masyarakat miskin dan rentan. Kita harus mendukung sehingga subsidi benar tepat sasaran.

Menurut Anda, apakah penggunaan NIK akan efektif untuk mengurangi subsidi?

Langkah ini tepat secara prinsip, dengan penggunaan NIK pastinya akan memudahkan pemerintah dalam memberlakukan subsidi langsung diarakat pro rakyat yang benar. Karena memang selama ini banyak juga pembeli non-subsidi yang beli gas melon.

Sekberapa besar dampaknya ketika membeli gas melon dengan NIK dalam membeli gas melon?

Dampaknya pasti besar, karena memang selama ini banyak juga pembeli non-subsidi yang beli gas melon.

Bagaimana jika penggunaan NIK meminimalisir kebutuhan gas melon?

Dalam prosesnya pasti ada hal yang harus kita persiapkan, seperti sistem yang pasif dan akurasi yang terbaik agar resisten atas kebijakan ini karena mungkin sudah terbiasa sebelumnya menggunakan gas melon sejak berada di rumah.

Jadi harusnya apprach yang baik untuk mereka diberikan pemahaman bahwa memang gas melon adalah untuk masyarakat yang sekiranya

itu ingin mendapatkan hal-hal kehadiran Pemerintah dalam kebijakan energi harus memudahkan.

Dalam hal ini mengingat kebijakan Pemerintah Prabowo-Sandi ini harus

berjalan ringan, cepat, transparan, dan betul-betul pro rakyat.

Kita ingin biaya hidup masyarakat semakin terangkat dan tidak lagi akhirnya

itu akhirnya berdampak pada akhirnya

citacita bangsa kita untuk mencapai

keberlanjutan energi dapat segera

terwujud. ■ REN

Apa respon dan tanggapan Anda terkait penggunaan NIK untuk membeli gas melon?

Ada catatan khusus terkait dengan mekanisme pembelian gas melon menggunakan NIK. Seperti kejadian di atas, ada potensi mempersulit akses bagi masyarakat yang sekiranya belum terdaftar atau mungkin di luar jangkauan dan belum masuk pendataan secara baik.

Jika menggunakan NIK, Apakah nantinya data masyarakat tidak bocor?

Itu juga memerlukan teknik dengan perlindungan data. Perlu ada integrasi data, perlindungan data yang dijaga secara privacy dan juga

integritas data agar tidak dianggap

data yang diolah hanya untuk

mengetahui harga dan kesehatan harga

dan di manfaatkan untuk keuntungan

tertentu.

Terkait dengan kesetaraan akses,

ini juga harus bisa dipastikan bahwa

gas melon dengan NIK tersebut

memang benar-benar untuk masyarakat.

Kebijakan ini ada potensi memper-

lakukan bumerang bagi masyarakat

sekitarnya belum terdaftar atau mungkin

di luar jangkauan dan belum masuk

pendataan secara baik.

Apa saran Anda?

Harus ada pengawasan dan juga

penindakan dari Pemerintah setempat

dan juga Pemerintah Pusat. Jangan

ambil ketiga pihak yang berjalan,

lalu penggunaan hemah akhirnya

sehingga adanya potensi penyeleweng-

an. Ini akan mengakibatkan bumerang juga untuk

konsumen dan juga Pemerintah. ■ REN

Makna Anda, jangan sampai antrian membeli gas melon terjadi lagi?

Jangan sampai nanti timbul masalah baru karena masyarakat yang sekiranya belum terdaftar atau mungkin di luar jangkauan dan belum masuk pendataan secara baik.

Menurut Anda, Kebijakan membeli gas melon dengan NIK berpotensi mempersulit masyarakat?

Kebijakan ini ada potensi memper-

lakukan bumerang bagi masyarakat

sekitarnya belum terdaftar atau mungkin

di luar jangkauan dan belum masuk

pendataan secara baik.